

MAKALAH



Pengembangan Praktek dan Pola Pengasuhan AKPOL Menuju Democratic Learning

Oleh:

*Dr. Mohammad Kemal Dermawan
(Kepala Departemen Kriminologi FISIP UI)*





Pengembangan Praktek dan Pola Pengasuhan AKPOL Menuju *Democratic Learning*

Mohammad Kemal Dermawan

Workshop dan seminar Tenaga Pengasuh Akpol.
PUSHAM, UII. Semarang, Rabu, 16 Oktober 2013.



Democratic Policing



- Masalah tidak dapat dipisahkan dengan Reformasi Kepolisian dengan tujuan *Democratic Policing* (selanjutnya DP).
- DP menjadi kerangka dasar setiap kegiatan Kepolisian, termasuk pendidikan polisi [juga Akpol] sejak Reformasi Kepolisian RI digulirkan.
- Empat norma utama DP, sesuai dengan konsensus yang ada secara luas, yakni : melayani warga dan kelompok, pertanggungjawaban hukum; transparansi dalam kegiatan, dan perlindungan hak asasi manusia (Bayley, 2001).
- DP tidak dapat efektif kecuali struktur, kebijakan, budaya, nilai-nilai dan karakter kepemimpinan organisasi, mendukung dan memperkuat kegiatan tersebut.

Democratic Policing



- Pelaksanaan DP membutuhkan kritik dan informasi eksternal, refleksi diri, analisis dan evaluasi praktek, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan.
- DP bukan model yang dapat ditransfer secara mekanis.
- DP menuntut perubahan mendasar di seluruh bidang (struktural-instrumental-kultural)
- Perubahan pemolisian melalui pendidikan dan pelatihan sebagai metode transformasi nilai-nilai (kultural) dan perilaku anggota polisi yang didukung secara struktural dan instrumental.
- Pendidikan (tingkat awal maupun bagian dari pendidikan berkelanjutan) dipandang sebagai aspek penting dari sosialisasi profesionalisme yang memadai di beberapa pekerjaan.
- Dalam pendidikan Kepolisian, telah ada upaya untuk membangun kurikulum pelatihan berbasis *Democratic Policing*

Democratic Policing dan Democratic Learning



- Pendidikan bertujuan untuk mempengaruhi sikap siswa sebagai cara untuk mempengaruhi keterampilan dan perilaku mereka.
- Asumsi jalur kasual → perubahan pengetahuan dan sikap merupakan langkah menuju perubahan perilaku atau lebih umum dalam perubahan perilaku profesional.
- Diperlukan sebuah tinjauan kritis sistematis dalam mempromosikan pendidikan sebagai cara terbaik untuk menstransfer nilai-nilai dan prinsip-prinsip *Democratic Policing* sebagai nilai baru yang efektif untuk nilai-nilai demokrasi (DP).
- Mendidik dan melatih polisi dengan menerapkan nilai, prinsip DP berarti menggantikan [sebagian] teori-teori pelatihan sebelumnya, dalam lingkungan belajar interaktif dimana instruktur [pengajar] dan siswa [taruna] saling membangun fenomena seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari → Pendekatan *andragogy* lawan pedagogi tradisional, jika dikaitkan dengan konteks demokrasi, disebut *Democratic Learning*.

Democratic Learning



- Penyelenggaraan *in-service training*, seminar regional, lokakarya, dan saluran komunikasi yang selalu terbuka
- Simulasi peristiwa kehidupan nyata di kelas serta program lapangan untuk menunjukkan kepada mereka apa yang sedang terjadi dalam pemolisian secara nyata.
- Fokus materi seharusnya tidak perlu banyak (pola-pola khas), dan bukan pula tentang bagaimana mengajar atau melatih, tetapi pada bagaimana dan mengapa siswa perlu belajar nilai-nilai demokrasi.
- Dalam DL, semua pihak, pendidik profesional, mahasiswa, dan anggota lain dari masyarakat, juga memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan kolaboratif, keputusan yang berdasar aspirasi, perhatian dan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- Wujud penghormatan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Instruktur dalam *Democratic Learning*



- Memfasilitasi/mempromosikan dinamika kelompok, lingkungan belajar yang aman, bebas dari tekanan, pembagian otoritas, kondisi saling ketergantungan, memaksimalkan potensi untuk kreativitas, mendorong eksplorasi dari berbagai perspektif, menghargai pengalaman, dan membantu siswa mengembangkan sistem pendukung dalam kelompok mereka.
- Memperhatikan apa yang diharapkan dari siswa, menganggap serius kegiatan belajar yang diidentifikasi oleh lembaga pendidikan yang direkomendasikan oleh siswa, dan hal ini juga diperkuat dalam literatur sebagai dukungan teoritis.
- Memberikan pengalaman belajar mereka kepada para siswa secara transformasional namun tidak bertujuan mengubah perspektif mereka bahkan mendorong pemberdayaan pribadi.
 - Menggunakan karakteristik untuk mengembangkan komunitas belajar sebagai kerangka kerja, bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan komunitas belajar dan pemodelan pembelajaran masyarakat.

Bagaimana di Akpol?



- Akpol adalah lembaga pendidikan Kepolisian untuk menghasilkan perwira polri yang bermoral, profesional, cerdas, dan modern, yang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar dalam konteks regenerasi kepolisian.
- Proses regenerasi kepolisian harus dikawal sejak dari proses pendidikan pembentukan sehingga karakter perwira kepolisian yang ideal dapat terbentuk sesuai profil perwira kepolisian yang memiliki kemampuan dalam aspek afektif, kognitif dan psiko motorik (sikap perilaku).
- Akpol membangun sistem pendidikan melalui aspek kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Kegiatan pengasuhan diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku yang meliputi usaha pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka menanamkan dan memantapkan perangkat nilai-nilai dasar yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta Etika Profesi Kepolisian.
- Pengasuhan diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan Gadikan pada satu lingkungan belajar untuk membentuk sikap, mental, moral, dan perilaku terpuji.

Sasaran Pengasuhan



1. Tercapainya perubahan mental dari kehidupan sipil, pembentukan, penanaman nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas, pembulatan, pematangan, dan pendewasaan sikap dan perilaku sebagai insan Bhayangkara yang profesional.
2. Tercapainya kemampuan akademis yang dapat menerapkan dan mengembangkan Ilmu Kepolisian serta kemampuan memecahkan permasalahan.
3. Tercapainya keterampilan taktik dan teknis Kepolisian dalam rangka menghadapi setiap bentuk gangguan kamtibmas yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
4. Tercapainya kesemaptaan fisik dan keterampilan olahraga yang memadai dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik selama menjadi Taruna maupun Perwira Polri.

Peran Pengasuhan Dalam Akpol



- Peran pengasuhan sangatlah penting dan menentukan.
- Materi pelajaran yang diperoleh siswa [taruna] melalui kegiatan pengajaran harus dapat dicerna dan dituangkan ke dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai DP yang dibimbing dalam pengasuhan. Sementara itu, pelatihan menjadi wadah *try-out* yang juga dibawah bimbingan dan pemantauan pengasuhan.
- Masalah yang kemudian perlu dibahas adalah siapakah aktor pengasuhan tersebut?, akankah Instruktur bersedia dan mampu untuk memfasilitasi/ mempromosikan dinamika kelompok, lingkungan aman, bebas tekanan, pembagian otoritas, kondisi saling ketergantungan, memaksimalkan potensi untuk kreativitas, mendorong eksplorasi dari berbagai perspektif?

Peran Pengasuhan Dalam Akpol



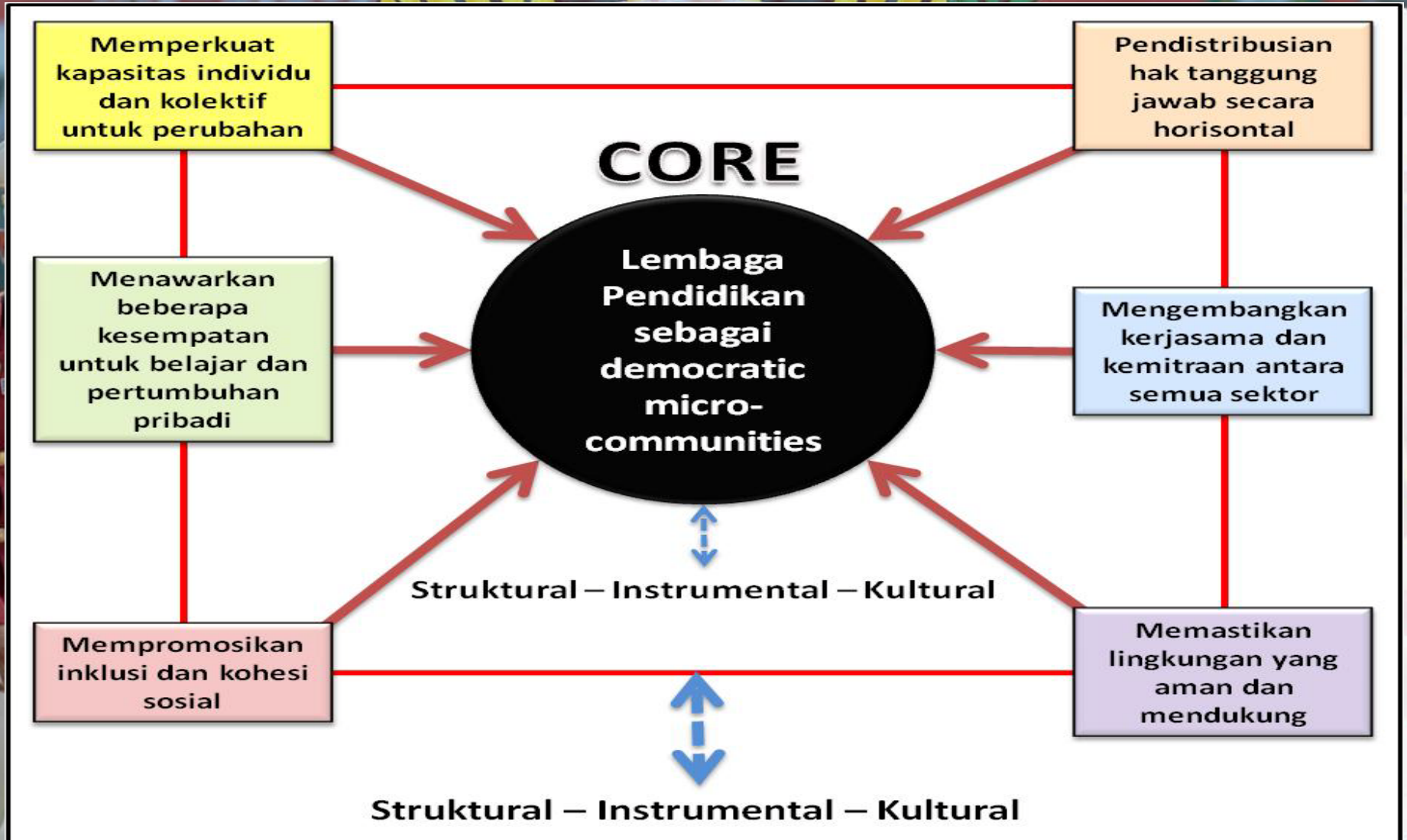
- Apakah Instruktur dari DL ini juga sudah menghayati prinsip-prinsip dan nilai-nilai *Democratic Policing* yang merupakan payung dari berlangsungnya pendidikan polisi di Akademi Kepolisian ini?
- Mengacu pada sasaran dan tujuan pengasuhan maka kegiatan pengasuhan berpotensi (atau sudah dilakukan?) untuk menjadi kegiatan DL
- Mengingat para pengasuh adalah perwira senior Polri aktif serta sebagian adalah “purna-tugas”, diasumsikan karier kepolisian pengasuh sudah cukup panjang dan mengalami dua periode pemolisian pra-DL dan era DL.
- *Pengasuh* dapat memberi contoh dan pengalaman dalam era dan gaya yang berbeda kepada para siswa [taruna] nya.

Penerapan DL di Akpol



- Di lembaga pendidikan DL, prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan, antara lain : 1) Pengembangan personal atau pribadi; 2) Pemecahan masalah; 3) Pengambilan keputusan, dan 4) Keterlibatan masyarakat atau komunitas.
- Keterlibatan masyarakat atau komunitas (butir 4), tidak hanya sebagai obyek pendidikan (sebagai ajang praktek DL) tetapi juga sebagai subyek pendidikan yang mempunyai akses bagi aspirasi mereka tentang pendidikan polisi (sebagai *stakeholder*).
- Lalu bagaimana Akpol merespon? Akpol memiliki otoritas hirarkis sendiri, pengembangan program pendidikan yang tidak terlepas dari inti (*core*) pendidikan polisi, dan seterusnya.
- Sementara di sisi lain, akses pada aspirasi masyarakat tersebut dalam perkembangannya dapat menjadi wujud pengakuan masyarakat tentang peran Akpol dalam mempromosikan pendidikan polisi untuk prinsip-prinsip demokrasi, tujuan kewarganegaraan, termasuk desentralisasi kebijakan pendidikan, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas semua aktor pendidikan

Skema Pemikiran Pendidikan Akpol Melalui DL



Penutup



- Lembaga pendidikan polisi seperti Akpol tentunya memiliki “kurikulum inti” [*core curicullum*] yang tidak dapat dirubah terkait dengan pendidikan calon polisi yang harus memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sebagai “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Sebagai wadah pendidikan polisi, terkait pula dengan metode *Democratic Learning*, Akpol dimungkinkan untuk tempat berlatih para siswa [taruna] untuk menerapkan materi pengajarannya (mungkin dalam kegiatan pelatihan) dalam konteks *Democratic Policing*. Dalam kondisi seperti ini, Akpol dapat berwujud sebagai *Democratic Micro Communities*.

Penutup



- Muatan *Democratic Learning* yang harus diterapkan dalam pendidikan Akpol (khususnya dalam kegiatan Pengasuhan) antara lain adalah : (1) memperkuat kapasitas individu dan kolektif untuk menerima perubahan; (2) pendistribusian hak dan tanggung jawab secara horizontal; (3) menawarkan beberapa kesempatan untuk belajar dan pertumbuhan pribadi; (4) mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan sektor yang terkait; melakukan magang di tengah-tengah masyarakat; (5) mempromosikan inklusi dan kohesi sosial dengan (6) memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung seluruh jalannya pendidikan.
- Para Pengasuh diharapkan dapat memberikan bimbingan , pembinaan dan pendampingan kepada siswa [taruna] sehingga menjamin hal-hal yang tertulis di butir 3 dapat terealisasi.

Penutup



- Semua butir di atas dapat terlaksana jika kebijakan-kebijakan lembaga pendidikan itu sendiri (Akpól) dari aspek Struktural, Instrumental dan Kultural mendukung terselenggaranya *Democratic Learning* beserta konsekuensinya.
- Sementara itu, ditingkat yang lebih tinggi, Kebijakan Pimpinan Polri, secara Struktural, Instrumental dan Kultural mendukung terselenggaranya *Democratic Learning* beserta konsekuensinya di lembaga pendidikan tersebut (Akpól).

Penutup



TERIMAKASIH

SEMOGA BERMANFAAT